

BAB III

DINASTI MUGHAL PADA MASA PEMERINTAHAN SULTAN AKBAR

PADA TAHUN 1556-1605

Sultan Akbar merupakan Raja ketiga dari Dinasti Mughal yang merupakan keturunan dari Raja Humayun. Sultan akbar lahir pada tanggal 15 Oktober 1542. Ia diangkat menjadi raja pada usianya yang keempat belas. Usia yang relatif muda menyebabkan Sultan Akbar tidak mampu menjalankan roda pemerintahan sehingga kepemimpinannya digantikan oleh Bairam Kham yang merupakan perdana menteri Dinasti Mughal dan paman dari Sultan Akbar. Setelah dewasa, Sultan Akbar menjalankan roda pemerintahan, dan meminimalisir pengaruh dari Bairam Khan selama menggantikan pemerintahannya. Semasa pemerintahannya, Sultan Akbar terkenal dengan raja yang memiliki berbagai kebijakan baik dibidang politik, agama, sosial, maupun dalam bidang kemiliteran. Berkat perjuangannya dalam penerapan kebijakan di Dinasti, ia dapat memperoleh kejayaan dan penghormatan dari raja-raja di wilayah Pakistan, dan India. Pada Bab III ini akan membahas mengenai Biografi, dan berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Akbar.

A. Biografi Sultan Akbar

1. Silsilah

Sultan Akbar merupakan raja ketiga dari Dinasti Mughal setelah masa Raja Humayun berakhir. Sultan Akbar menjadi raja pada umur 14 Tahun. Berdasarkan riwayat kehidupannya, Sultan Akbar memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia di lingkungan kerajaan. Ia memiliki beberapa orang Istri dan anak. sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Rohman (2011: 14) yang menyatakan bahwa:

Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar memiliki beberapa istri atau pasangan yakni Ruqaiya Sultan Begum, Salima Sultan Begum, dan Jodha Bai yang kelak dikenal dengan Mariam uz-Zamani. Mariam Uz-Zamani adalah gelar yang diberikan para penguasa kerajaan Mughal kepada istri raja yang telah melahirkan anak untuk menjadi pewaris tahta kerajaan Mughal. Gelar ini jatuh kepada salah satu istri atau pasangan Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar yakni Jodha Bai yang merupakan putri Rajput(kerajaan Hindu). Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar memiliki anak dari Jodha Bai istrinya yakni Sultan Jahangir (Pangeran Salim) yang menjadi pewaris tahta dan raja setelah Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar.

Dari pendapat di atas dapat digambarkan bahwa Sultan Akbar memiliki tiga orang Istri. Istri yang melahirkan dan mewarisi tahta memiliki gelar Mariam us-Zamani. Gelar ini ternyata jatuh pada seorang wanita yang bernama Joda Bai. Dari pernikahannya dengan Joda Bai, Sultan Akbar memiliki tiga orang anak yaitu Hussain Mirza, Hassan Mirza, dan Jahangir (pangeran Salim). Dari ketiga anaknya tersebut penerus Tahta kerajaan Mughal jatuh pada pangeran Jahangir (Salim).

Selain menikahi Joda Bai (Mariam Uz-Zamani) dan menjadikannya salah satu permaisuri di Dinasti Mughal, Sultan Akbar juga memiliki dua orang istri yakni Ruqaiya Sultan Begum dan Salima Sultan Begum. Menurut Agustina (2020) bahwa:

Ruqqaiya Sultan Begum merupakan isteri dari Sultan Akbar yang merupakan anak dari Hindal Mirza yang tidak lain adalah adik Sultan Humayun. Pada bulan Novemberr 1551 M, mereka menikah dan pernikahannya diatur oleh Ayahnya. Namun dari pernikahan dengan Ruqayya, Sultan Akbar tidak dikaruniai anak.

Dari uraian di atas dapat diambil penjelasan bahwa Sultan Akbar juga memiliki isteri bernama Ruqayya Sultan Begum. Ruqayya Sultan Begum merupakan anak dari Hindal Mirza yang merupakan adik kandung Raja Humayun. Jadi Ruqayya Sultan Begum masih bersaudara dengan Sultan Akbar yakni adik sepupu. Dari pernikahannya dengan Ruqayya, Sultan Akbar tidak memiliki seorang putera maupun puteri. Kemudian, Sultan Akbar menikahi Janda bernama Salima Sultan Begum. Menurut pendapat Supardi (2019) menyatakan bahwa:

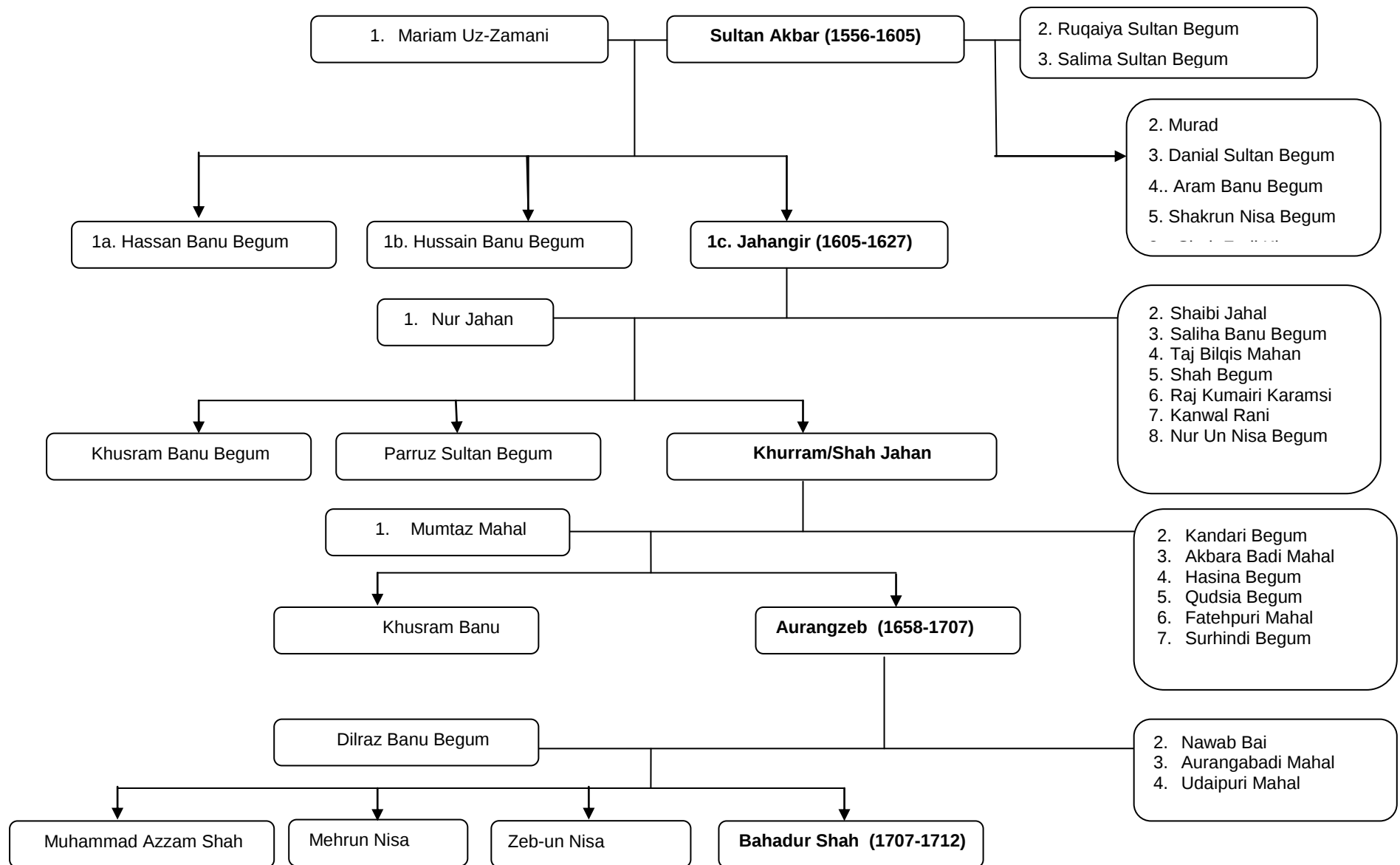
Istri kedua Sultan Akbar bernama Salima Sultan Begum. Salima merupakan mantan isteri dari Bairam Khan. Sultan Akbar memutuskan untuk menikahi Salima, karena ia berpikir itulah satu-satunya jalan terbaik bagi mereka sekaligus sebagai cara ia membalas budi atas semua yang ia dapatkan dari Bairam Khan. Dari pernikahannya ia diakruniai empat orang anak yakni Murad, Danial, Aram, dan Sekhrun.

Terkait dengan penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa Sultan Akbar menikahi Salima Sultan Begum. Sebelum dinikahi oleh Sultan Akbar, Salima adalah isteri Bairam Khan yakni perdana menteri di Dinasti Mughal. Bairam Khan berusaha memberontak pada Sultan Akbar sehingga Sultan Akbar menyelesaikan pemberontakan itu dan menewaskan Bairam Khan. Atas kebijakan Sultan Akbar sebagai raja, ia menikahi Salima sebagai rasa terima kasihdan balas budi terhadap bantuan dan ilmu yang didapatkan dari Bairam Khan selaku pengasuh sekaligus perdana menteri di Dinasti Mughal.

Setelah Sultan Akbar wafat, pemerintahan Dinasti Mughal diserahkan kepada putra mahkota yakni pangeran Jahangir. Raja Jahangir memerintah Dinasti Mughal pada tahun 1605-1628. Berdasarkan riwayat kehidupan dan keluarganya, Jahangir memiliki dua orang istri yakni Sher Afgan Quli dan Asmat Begum. Dari istrinya tersebut Jahangir memiliki dua orang anak yaitu Shah Jahan dan Ladli Begum. Menurut Suhaedi (2013) bahwa:

Periodisasi kepemimpinan Mughal di India setelah Sultan Akbar, diwariskan ke Putranya yakni Sultan Jahangir yang merupakan anak Sultan Akbar dengan Istrinya Joda Bai (Mariam Uz-Zamani). Jahangir memiliki dua orang Istri dan dua orang Putra yakni Shah Jahan dan Ladli Begum.

Terkait dengan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Sultan Jahangir adalah penerus kerajaan Mughal setelah wafatnya Sultan Akbar. Ia memiliki dua orang istri yang sangat ia cintai. Dari pernikahannya dengan Sher Afgan Quli ia memiliki satu orang anak bernama Shah Jahan dan dari isterinya Asmat Begum memiliki putra Ladli Begum. Kepemimpinan Jahangir dalam kerajaan Mughal sangat kontradiksi dengan kepemimpinan dari ayahnya yakni Sultan Akbar, sehingga politik yang diterapkan Sultan Akbar mulai memudar dan terjadi banyak pemberontakan. Setelah sultan Jahangir wafat, beliau digantikan dengan Shah Jahan yang merupakan putranya dengan Sher Afgan Quli. Secara lebih Rinci berikut adalah Silsilah dari Sultan Akbar hingga cucunya Shah Jahan dalam memerintah kerajaan Mughal.



Keterangan:

———— : Istri/menikahi
 —————> : Anak

Gambar 2. Silsilah Sultan Akbar

2. Karakter

Pada awal pemerintahannya, Sultan Akbar memiliki karakter yang tegas dan pemberani. Namun, ketegasan dan keberaniannya membuat Sultan Akbar bertindak sewenang-wenang terhadap siapapun termasuk pada saudaranya. Kehadiran sosok istri yakni Mariam Uz-Zamani (Jodha Bai) mengubah tindakan sewenang-wenangnya dan membuat Sultan Akbar menjadi seorang pemimpin yang lembut, baik hati, dan bijaksana.

Dahulu mereka masih mengenalnya dengan sebutan Jalal, hanya mendengar namanya saja orang-orang pasti merasa ketakutan. Ia hanya seorang yang bisa melakukan satu hal, tidak tahu yang lainnya lagi, hanya bisa menumpahkan darah. Orang-orang istana yang berani memberontak kepadanya, maka ia tidak segan-segan untuk melenyapkannya meskipun sang pemberontak itu adalah saudara atau orang-orang dekatnya, sebagai contohnya yakni Adham Khan yang merupakan saudara angkatnya mencoba membunuh perdana menteri kerajaan yakni Shamsuddin Muhammad Atga Khan, Sultan Akbar memergoki perbuatan Adham Khan dan langsung menghantamnya dan menyuruh pelayan untuk mengikat Adham Khan lalu melemparkannya ke halaman istana. Namun Seiring berjalannya waktu, Mariam Uz-Zamani atau Jodha Bai yang merupakan istrinya telah merubahnya menjadi raja yang baik hati, lembut, berperasaan dan selalu mementingkan rakyatnya. Sehingga seluruh rakyat India menyukai cara kepemimpinannya (Nurjati, 2019)

Sultan Akbar merupakan sosok yang sangat toleran. Ini dibuktikan setelah ia membentuk *Politik Sulakhul(Toleransi Universal)*, selain sebagai bentuk dari karakter yang ia miliki juga merupakan sebuah konsep yang diterapkan pada pemerintahannya untuk mengokohkan kepemimpinannya dengan cara menyamakan status rakyatnya satu sama lain, dan tidak membedakannya antara etnis atau agama. Senada dengan pendapat tersebut menurut Suhaedi (2017: 181) bahwa:

Sultan Akbar menerapkan politik Sulakhul (toleransi universal). Strategi ini memandang bahwa semua rakyat adalah sama, mereka tidak dibedakan sama sekali oleh ketentuan-ketentuan agama atau lapisan sosial. Sultan Akbar banyak kebijakan yang bersifat toleransi sosial diantaranya adalah menghapus batasan antara muslim dan non muslim dalam bidang pendidikan dan ekonomi. Ia juga menghapus sistem perbudakan.

Dari uraian di atas dapat digambarkan bahwa Sultan Akbar merupakan sosok yang memiliki toleransi yang tinggi. Demi mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, Sultan Akbar memberikan banyak toleransi kepada rakyat khususnya rakyat miskin, kaum minoritas, dan perdagangan. Pada bidang toleransi keagamaan, Sultan Akbar memberikan kebebasan kepada umat muslim

maupun non muslim untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Pada bidang ekonomi, semua orang berhak untuk mengadakan perdagangan, baik itu rakyat jelata maupun kaum bangsawan. Semua orang dianggap memiliki kedudukan yang sama.

3. Pendidikan

Sultan Akbar tidak menerima pendidikan formal. Artinya ia tidak pernah bersekolah, bahkan menurut sejarawan bahwa Sultan Akbar adalah seorang yang tidak pandai membaca dan menulis, tetapi Sultan Akbar memiliki ingatan yang luar biasa dan mempunyai keinginan untuk menuntut ilmu. Ia tidak menerima pendidikan formal karena ia dilahirkan sewaktu ayahnya menjadi seorang pengembara. Sultan Humayun menjadi pengembara karena ia kalah dalam pertempuran melawan Sher Khan Syah pada tahun 1540, maka Sultan Humayun melarikan diri selama 15 tahun meninggalkan Delhi bersama Ibu dari Sultan Akbar, yakni Hamida Banu Begum.

Sejak kecil, Sultan Akbar lebih mengutamakan berburu dari pada belajar, sehingga selama hidupnya, ia kurang bisa membaca dan menulis, walaupun demikian, ia meniru sifat kakek dan ayahnya yang suka mendengarkan orang-orang yang menuntut ilmu. Sultan Akbar juga membantu perkembangan sastra dan ilmu pengetahuan. Di istananya, ia membuat kantor untuk para pelukis dan arsitek dan memberinya fasilitas lengkap. Sultan Akbar memiliki karakter yang pemberani, berwatak keras, senang berperang, berburu dan memanah (Amin, 2016: 16).

Pendapat di atas menjelaskan bahwa Sultan Akbar kurang menyukai ilmu pelajaran dan lebih menyukai berburu. Hal ini berakibat pada kurangnya kemampuan membaca dan menulis. Pengetahuan-pengetahuan yang ia dapatkan berasal dari kemampuan menyimak dan mendengarkan dari orang lain. Sultan Akbar juga kerap kali mendengarkan berbagai pelajaran yang disampaikan oleh para pendeta Kristen dan para pendakwah dan mengundang mereka ke istana untuk berdiskusi dengan para ahli fikih Muslim. Namun Sultan Akbar tetap memegang teguh Islam dengan akidah yang benar. Sejak masih kanak-kanak Sultan Akbar sudah mendapat pendidikan militer. Ia seperti kakeknya, memulai karier militernya sejak masih kanak-kanak. Pada waktu Sultan Humayun, ayah dari Sultan Akbar meninggal dunia, ia sedang berada di medan perang bersama Bairam Khan untuk melawan seorang saudara Sher Khan Shah. Sehingga tidak mengherankan ia sangat pandai dalam hal militer,

sehingga sistem pemerintahan Sultan Akbar di kerajaan Mughal adalah dengan sistem militer (militeristik).

B. Kebijakan yang diterapkan oleh Sultan Akbar

1. Kebijakan dalam Bidang Politik Sultan Akbar Tahun 1556-1605

Pada masa awal pemerintahan Sultan Akbar di kerajaan Mughal pada mulanya mengalami kemerosotan, yang ditandai dengan krisis ekonomi yang membuat rakyatnya mengalami kelaparan. Di samping itu juga, kondisi kerajaan Mughal pada saat itu sedang tidak stabil, dimana terdapat banyak pemberontakan-pemberontakan terjadi yang menghiasi awal kepemimpinannya di kerajaan Mughal. Namun dengan kecakapan yang ia miliki, dapat menyelesaikan masalah itu dan dengan seiring berjalannya waktu maka ia membuat kerajaan Mughal mencapai masa kejayaan. Sebagaimana diungkapkan oleh Suwarno (2010: 91) bahwa:

Sultan Akbar memang seorang raja yang sangat cakap. Dia mengatur sistem politik dan administrasi dengan mengadopsi sistem yang sudah mapan (Arab dan Persia) yang disesuaikan dengan kondisi India. Sistem politik imperium Mughal disusun menurut pola kekhalifahan Dinasti Abbasiyah yang sebenarnya menganut pola Greco-Roman, yaitu *Coe Ropapisme* (Raja sebagai kepala negara sekaligus pemimpin agama).

Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa sistem politik yang diterapkan oleh Sultan akbar ternyata mengadaptasi dari sistem politik dari Dinasti-dinasti yang sudah mencapai kejayaan seperti Dinasti yang ada di Persia dan Arab. Sistem politik yang dianut oleh Dinasti Mughal hampir sama dengan sistem politik Dinasti Abasiyah yakni mengikuti pola Greco Roman. Sultan Akbar menganggap dirinya sebagai raja sekaligus pemimpin agama, sehingga Sultan Akbar memiliki dua kedudukan yang sama tinggi.

Dalam aspek politik, Sultan Akbar banyak menjalankan usaha-usaha dalam memerintah di kerajaan Mughal, diantaranya:

Pertama adalah Sultan Akbar memerangi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan Shah yang berkuasa di Punjab dan pemberontak yang dilakukan oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Ini dilakukan oleh Sultan Akbar untuk tetap menjaga situasi politik kerajaannya. Yang kedua berkaitan dengan politik pemerintahan dimana ia berusaha melepaskan diri dari pengaruh orang-orang yang selama ini mempengaruhi pemerintahan. Diantara kebijakan politik Sultan Akbar yang paling berani adalah menyingkirkan pengaruh dari Bairam Khan, penasihat politik Syiah yang dipercayai Humayun yang ia anggap sudah terlalu luas kekuasaannya di kerajaan Mughal. Maka dari itu Sultan Akbar ingin berkuasa penuh terhadap pemerintahannya dengan cara

menyingkirkan Bairam Khan. Yang ketiga ia berusaha untuk merebut kembali wilayah yang pernah dikuasai oleh Sultan Humayun. Yang keempat adalah menerapkan *politik sulakhul (toleransi universal)*. Sultan Akbar memiliki sifat yang sangat toleran, dan kakeknya pernah berpesan bahwa di dalam memimpin sebuah kerajaan yang terdapat berbagai macam suku, ras, dan agama maka cara memerintah yang paling baik adalah dengan berlaku adil. Maka dengan itu ia menerapkan *politik sulakhul (toleransi universal)*. Inti dari *politik sulakhul (toleransi universal)* adalah persamaan hak antara rakyat kerajaan Mughal pada saat itu, dengan tidak membedakan suku, ras, dan juga agama. Usaha seperti ini belum ada sebelumnya (Thohir, 2014: 105).

Sehubungan dengan uraian di atas bahwa Hindu merupakan agama mayoritas yang ada di wilayah India pada masa kekuasaan Sultan Akbar dan Islam merupakan agama minoritas pada saat itu. Maka Sultan Akbar membentuk *politik sulakhul (toleransi universal)* ini agar ia mendapat sokongan dari umat Hindu yang merupakan mayoritas untuk memperkuat dan memperkokoh kerajaan Mughal yang ia pimpin. Dengan politik ini, semua rakyat India dipandang sama, tidak dibedakan antara etnis dan agama. Masyarakat Hindu menerima dengan sangat baik *politik sulakhul (toleransi universal)*.

2. Kebijakan dalam Bidang Sosial Sultan Akbar Tahun 1556-1605

Kebijakan dalam bidang sosial merupakan suatu kebijakan yang diterapkan dalam hubungannya dengan rakyat. Bagi suatu negara, Rakyat sangat dibutuhkan untuk memperkuat kedudukan dan wilayah. Oleh karena itu, seorang pemimpin atau raja harus mendapatkan banyak dukungan rakyat. Untuk mendapatkan dukungan penuh dari rakyat maka pemimpin atau raja harus menerapkan kebijakan yang menguntungkan banyak orang.

a. Politik Sullakhul (Toleransi Universal)

Dalam bidang sosial Sultan Akbar sangat menekankan toleransi dan persamaan hak antara manusia, maka dengan itu menerapkan *politik Sulakhul (toleransi universal)*, dimana ia menginginkan tidak ada perbedaan antara etnis dan agama di antara rakyatnya, mereka dipandang sama dan patut mendapat perlindungan dari kerajaan.

Menurut pendapat Nasution (2013: 50) bahwa dengan diterapkan *politik Sulakhul (toleransi universal)* adalah juga sebagai alat politik untuk memperkuat pemerintahan Sultan Akbar. Sultan Akbar memiliki istri yang merupakan seorang Hindu. Namun ia mempersilahkan istrinya itu untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang, dan ia juga memberikan kebebasan kepada para wanita (istana) yang non-Muslim untuk menjalankan ibadahnya dengan tenang. Inilah salah bentuk betapa tolerannya Sultan Akbar.

Terkait dengan kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Sultan Akbar dalam menjalankan pemerintahannya, membuat kebijakan sosial untuk seluruh rakyatnya. Kebijakan sosial itu disebut dengan politik Sulakhul atau yang dikenal dengan istilah toleransi universal. Kebijakan ini adalah memuat tentang berbagai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi semua masyarakat. Politik Sulakhul terdiri dari toleransi beragama, toleransi dalam sosial, dan toleransi dalam ekonomi. Dalam bidang sosial keagamaan, Sultan Akbar memberikan kebebasan kepada semua warga untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini dibuktikan dari toleransi Sultan Akbar kepada istrinya yang memeluk agama Hindu. Ia memberikan kebebasan kepada istrinya untuk beribadah di kuil. Tentu saja hal ini membuat rakyat senang dan tenang dalam beribadah maupun berhubungan sosial dengan orang lain walaupun berbeda kasta.

Dengan menerapkan *politik sulakhul (toleransi universal)* maka Sultan Akbar berhasil mempersatukan antara masyarakat Islam dan Hindu. Usaha ini berhasil dilakukan karena Sultan Akbar terkenal dengan kekuatan akal yang ia miliki. Terbukti dengan diterapkannya usaha ini, maka dapat mendamaikan dan mempersatukan antara umat Islam dan umat Hindu, mensamaratakan hak antara umat Islam dan umat Hindu, memakmurkan rakyat dengan menghilangkan pajak. Ini semua diterapkan oleh Sultan Akbar karena ia menganggap bahwa memimpin sebuah kerajaan dengan suku dan agama yang beragam, tidak ada cara yang terbaik selain dengan berlaku adil, seperti yang telah dipesankan oleh kakeknya. Disamping itu dengan menerapkan usaha *politik sulakhul (toleransi universal)* ini Sultan Akbar dapat menarik simpati dan sokongan dari umat Hindu yang tidak di dapatkan dari penguasa kerajaan Mughal sebelum Sultan Akbar. Dan dari sokongan tersebut dapat membuat kerajaan Mughal lebih kuat dan kokoh dan dapat tetap eksis meskipun merupakan sebuah kerajaan Islam yang minoritas dan memerintah masyarakat Hindu yang mayoritas.

Sama seperti yang dilakukan Rasulullah saw. ketika mempersaudarakan para golongan penduduk Madinah (Yastrib) ketika Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, yakni antara penduduk Arab Muslim, penduduk Arab non-muslim dan Yahudi dengan cara mengadakan perjanjian dalam piagam yang disebut "Konstitusi Madinah" Dan menjadikan Madinah pada saat itu menjadi negara yang makmur, aman dan tentram. Dengan toleransi maka dapat menjadikan hidup lebih tenang dan tentram (Nasution, 2013: 44).

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Sultan Akbar melakukan politik pemerintahan sebagaimana yang diterapkan oleh Rasulullah dengan mengadakan perjanjian dan menggunakan konsep persatuan dan kesatuan melalui toleransi. Rakyat adalah inti dari sebuah pemerintahan sehingga dalam menjalankan politik dukungan rakyat sangat diperlukan.

b. Isi Politik Sulakhul

Politik sulakhul yang diterapkan oleh Sultan Akbar memiliki dasar-dasar kebijakan untuk rakyat. Menurut Sophiah (2021: 3) bahwa isi reformasi yang tertuang dalam politik sulakkhul sebagai berikut:

- 1) Menghapus Jizyah bagi nonmuslim
- 2) Memberikan pelayanan pendidikan dan pengajaran yang sama bagi setiap masyarakat yakni dengan mendirikan madrasah-madrasah dan memberikan tanah wakaf bagi lembaga sufii
- 3) Membentuk undang-undang perkawinan baru yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, stabilitas, dan integrasi masyarakat muslim dan non muslim
- 4) Menghapus pajak-pajak pertanian terutama bagi petani miskin.
- 5) Menghapus tradisi perbudakan

Kutipan di atas menjelaskan bahwa ada lima isi dari kebijakan politik sulakhul yang diterapkan oleh Sultan Akbar yang untuk kepentingan rakyatnya. Pertama adalah menghapus jizyah. Jizyah merupakan suatu pajak yang dikenakan bagi kaum non muslim sebagai biaya perlindungan dan kebebasannya di suatu negara. Penghapusan Jizyah di India yang dilakukan oleh Sultan Akbar dilakukan sebagai penghormatan kepada kaum non muslim. Kedua, Sultan Akbar mendirikan banyak sekolah untuk kepentingan pendidikan Rakyatnya baik untuk muslim maupun non muslim. Artinya siapa saja yang ada di negara itu berhak untuk merasakan pendidikan baik di kalangan rakyat jelata maupun kaum bangsawan, semua orang diberikan hak yang sama. Ketiga yakni membentuk undang-undang perkawinan yang mengatur tentang kebebasan untuk menikah baik sesama muslim maupun campuran antara muslim dan non muslim. Keempat, Sultan Akbar menghapus pajak-pajak yang dianggap dapat mengsengsarakan rakyatnya. Bagi rakyat yang kurang mampu diperbolehkan untuk tidak membayar pajak pada Negara. Kelima adalah menghapus perbudakan. Pada kebijakan ini Sultan Akbar menghapus sistem kasta yang ada pada rakyat sehingga tidak ada istilah budak di negara India pada masa itu.

3. Kebijakan dalam Bidang Agama dan Seni Sultan Akbar Tahun 1556-1605

a. Ibadat Khana

Usaha dalam aspek keagamaan ini menjadi kontroversi pada saat itu dan menuai pro dan kontra di antara rakyat kerajaan Mughal. Pada permulaan awal berdirinya kerajaan Mughal yang didirikan dan diperintah oleh Sultan Zahiruddin Muhammad Babur sampai dengan pertengahan pemerintahan Sultan Akbar, para ulama sebagaimana juga pada masa kesultanan Delhi sangat memegang peranan penting dalam pemerintahan terutama mengenai agama dan kemasyarakatan.

Di masa pemerintahan Sultan Akbar ada dua pemuka agama yang sangat berpengaruh yakni Maulana Sultan puri yang bergelar *Makhdumul Mulk* sebagai Syeikhul Islam, dan Syekh Abdul Nabi sebagai *Sadr-as-Sudur*. *Sadr-as-Sudur* adalah semacam departemen agama yang mengurus soal-soal agama Islam yang berkedudukan di pusat kerajaan. Mereka berdua adalah wakil kaum ortodoks Islam di Istana yang sangat berpengaruh (Saefudin, 2013).

Sultan Akbar memulai pemerintahannya di kerajaan Mughal sebagai seorang Islam Ortodoks yang taqwa. Ia menunaikan shalat lima waktu secara berjamaah, sering melakukan adzan, ia juga kadang kala membersihkan Masjid. Ia sangat menghormati dua pemimpin agama yakni *Makhdumul Mulk* dan Syekh Abdul Nabi. Syekh Abdul Nabi diangkat menjadi *Sadr-ul-Sudr* pada tahun 1565, dengan diberi otoritas yang tidak pernah dijabat oleh orang lain yakni sebagai pemegang agama tertinggi dalam kerajaan. Sultan Akbar juga selalu datang kerumahnya untuk mendengarkan sabda-sabda Nabi Muhammad saw.

Sultan Akbar memiliki semangat keagamaan, sehingga ia mendirikan *Ibadat Khana* (tempat diskusi keagamaan) yang dibangun pada tahun 1575 di Fatehpur Sikri. *Ibadat Khana* ini merupakan rumah ibadat yang digunakan untuk diskusi agama antara kaum Muslim. Pada sidang pertama disana atau pertemuan pertama di *Ibadat Khana* para petinggi agama ini bertengkar mengenai tempat duduk, tapi itu dapat diatasi. Kemudian diantara mereka saling bertengkar tentang kecerdasan masing-masing, sehingga Sultan Akbar menjauhi mereka. Pertikaian itu mencapai klimaksnya pada tahun 1577 dimana Syekh Abdul Nabi menjatuhkan hukuman mati kepada seorang brahmana yang didakwa mengambil material pembangunan Masjid dan mencaci Nabi Muhammad saw. Sultan Akbar dan juga sebagian besar pejabat istana mengkritik vonis tersebut dan menganggapnya terlalu berat (Saputera, 2015)

Sultan Akbar tidak hanya disusahkan mengenai masalah diatas, tetapi saat itu kekuasaannya sangat terbatas. Sultan Jalaluddin Muhammad Akbar kemudian berdiskusi kepada Syekh Mubarak yang merupakan seorang ulama berpikiran bebas yang juga ayah dari Abu Fazl, yang sedang berdagang ke

istana pada saat itu. Syekh Mubarak mengatakan bahwa menurut undang-undang Islam, jika ada pertikaian pendapat antara ahli hukum, maka kepala pemerintahan Islam mempunyai otoritas dan berhak memilih salah satu pendapat. Dari sinilah kemudian disusun sebuah dokumen yang menjelaskan bahwa Sultan Akbar mempunyai hak otoritas untuk memilih satu pendapat yang menguntungkan bangsa, jikalau terjadi perselisihan di antara rakyatnya. Dokumen ini menjadi cikal bakal kekuasaan Sultan Akbar terkait agama di kerajaan Mughal.

Menurut Pendapat Suwarno (2010: 93) menjelaskan bahwa:

Sultan Akbar tadinya adalah seorang muslim ortodoks yang sangat taat. Tetapi minatnya dalam bidang ini membuat Sultan Akbar menjadi sangat toleran dan eksletik. Sultan Akbar melangkah lebih jauh dengan upayanya mendirikan sebuah agama baru yang diberi nama Din-i-Ilahi. Permulaannya barangkali dimaksudkan untuk melakukan pembaruan agama, namun ini ternyata merupakan sebuah agama baru yang berasal dari campuran dari berbagai agama.

Terkait dengan penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa Sultan Akbar adalah seorang muslim ortodoks yang memiliki pengetahuan atau wawasan yang sangat luas tentang agama. Hal ini mempengaruhi paham-paham yang ia miliki.

b. Din Illahi

Sebagai Raja sekaligus pemimpin Agama yang kuat, ia menerapkan pemahamannya tersebut dengan maksud untuk melakukan pembaharuan Agama dengan menyebutnya sebagai Din-i-Ilahi. Akan tetapi penerapan pemahamannya itu telah menciptakan agama baru yang merupakan gabungan dari ajaran agama (Sinkretisme). Hal senada diungkapkan oleh Saputera (2015) bahwa:

Setelah adanya dokumen itu, maka Sultan Akbar menjalankan kekuasaannya dengan tidak terbatas. Ia menjadi seorang autokrat. Sultan Akbar kemudian mengundang para pemuka antar agama ke *Ibadat Khana* yang semula hanya untuk Islam, namun seiring berjalannya waktu maka *Ibadat Khana* ini diperuntukkan untuk seluruh agama yang ada di India. Dengan itu maka terjadilah pemberontakan di Jaunpur pada tahun 1579 sebagai protes pembaharuan agama yang dilakukan oleh Sultan Akbar. Menurut Badauni, seperti yang dikutip oleh Blochmann, bahwa penyebab langsung dari pemberontakan itu adalah penghapusan Tamgha (toll tanah pedalaman) dan Jizyah. Pemberontakan itu dapat diatasi oleh Sultan Akbar. Setelah itu pada tahun 1582, menurut *Vincent Smith*, Sultan Akbar mengumumkan gagasan barunya terkait *Din-i-Ilahi*

(Saputera, 2015).

Dari penjelasan di atas bahwa dengan adanya atau dibentuknya *Din-i-Ilahi* ini pada tahun 1582, maka banyak yang berargumen bahwa Sultan Akbar telah keluar dari agama Islam (Murtad). Informasi bahwa Sultan Akbar telah keluar dari agama Islam ini berdasarkan informasi dari Badauni melalui buku yang ia tulis yang berjudul *Muntakhab al-Tawarikh* yang di dalamnya berisikan informasi tentang *Din-i-Ilahi* yang diterjemahkan oleh Blochmann. Badauni merupakan sejarawan yang sejaman dengan Sultan Akbar dari kaum ortodoks Sunni.

Menurut Soleha (2017) bahwa Faktor-faktor Sultan Akbar membentuk *Din-i-Ilahi (Tauhid Ilahi)* ini adalah diantaranya:

- a. ulama dan pemimpin agama saling berbeda pendapat tentang masalah keagamaan.
- b. Mereka saling mengecam dan berpecah-belah
- c. Keadaan rakyat dan penganut agama-agama di India semakin fanatik karena pengaruh tokoh-tokoh agama, bahkan rakyat tidak sedikit yang saling bertikai
- d. pengaruh penasihat-penasihat agama dan politik Sultan Akbar, antara lain, Abu Fazl, Mir Abdul Lathif (Persia) dan Syekh Mubaraq yang membiarkan, bahkan, tidak jarang mendorong Sultan Akbar berfikir bebas dan radikal.

Din-i-Ilahi ciri-ciri pentingnya adalah:

- a. Percaya pada keesaan Tuhan;
- b. Akbar sebagai khalifah Tuhan dan seorang *padash (al-insan al-kamil)*; ia mewakili Tuhan di muka bumi dan selalu mendapat bimbingan langsung dari Tuhan; ia *terma'shum* dari segala kesalahan;
- c. Semua pemimpin agama harus tunduk dan sujud pada Akbar;
- d. Sebagai manusia *padash*, ia berpantangan memakan daging (*vegetarian*);
- e. Menghormati api dan matahari sebagai simbol kehidupan;
- f. Hari ahad sebagai hari resmi ibadah;
- g. "Assalamualaikum" diganti "Allahu Akbar" dan "Alaikum salam" diganti "jallajallah."

Sehubungan dengan uraian di atas bahwa Din-illahi memiliki karakteristik mengandung nilai ketauhidan yakni mengesakan Tuhan. Kepercayaan ini kemudian dijadikan suatu politik bahwa raja adalah wakil Tuhan yang ada di Bumi sehingga rakyat harus percaya dan mematuhi apa yang diperintahkan oleh raja kepadanya. Din Illahi juga mengajarkan tentang adab dalam menyantap makanan, din illahi melarang untuk memakan daging dan cenderung vegetarian.

Kepercayaan din illahi juga memuat tentang penyembahan matahari dan api sebagai sumber kehidupan di muka bumi. Selain itu, dalam Din Illahi juga mengajarkan tentang hari-hari suci dan penggantian sebagian ucapan salam.

Din-i-Ilahi menggabungkan unsur-unsur terbaik dari ajaran Islam dan Hindu, ditambah dari unsur agama atau kepercayaan lainnya seperti Kristen, Jainisme, Zoroastrianisme, dan seterusnya (sinkretisme). Din-i-Ilahi sama dengan konsep Pancasila sebagai *ideologi* bangsa Indonesia. Akbar memang tidak lantas mendeklarasikan Din-i-Ilahi sebagai agama baru. Din-i-Ilahi adalah alat utama birokrasi Akbar dalam usaha mencari legitimasi untuk menciptakan kepemimpinan langsung di bawah komandonya. Para pengikut bersumpah mengorbankan jiwa, harta, agama, dan kehormatan demi Akbar. Dengan Din-i-Ilahi, Akbar menciptakan sistem yang menguntungkan, sehingga mereka yang bergabung bukan hanya akan menjadi bagian dari pemerintahan Mughal, tetapi juga bakal mempertahankannya habis-habisan. Kenyataannya, Din-i-Ilahi memang tidak pernah menjadi agama atau kepercayaan baru dalam arti yang sesungguhnya. Pertentangan keras dari kalangan muslim berpengaruh membuat Din-i-Ilahi sulit memikat banyak peminat, melainkan hanya para pejabat terdekat Akbar saja yang konon jumlahnya cuma belasan orang. Taktik politik berbalut agama yang diterapkan Maharaja Akbar melalui Din-i-Ilahi pada akhirnya memang kandas. Banyak perlawanan muncul, bahkan dari salah satu putranya sendiri yang bernama Salim, yang berupaya merebut takhta sang ayah.

4. Kebijakan dalam Bidang Ekonomi Sultan Akbar Tahun 1526-1605

Kebijakan lain yang diterapkan oleh Sultan Akbar dalam masa pemerintahannya juga merambah dalam bidang ekonomi. Perekonomian suatu kerajaan sangat penting untuk pembangunan dan kelangsungan hidup rakyat di kerajaan. Oleh sebab itu, Sultan Akbar juga memperhatikan keadaan ekonomi kerajaan Mughal dan menerapkan berbagai peraturan sehingga rakyat dapat sejahtera dan makmur. Kebijakan Ekonomi yang diterapkan oleh Sultan Akbar diantaranya adalah penghapusan pajak bagi rakyat miskin. Menurut Agustina (2020: 133) menjelaskan bahwa:

Sultan Akbar menerapkan sistem ekonomi pada sektor pertanian dan perdagangan, juga ditunjang dengan sistem penarikan pajak tanah dengan hasil bumi, pemberian hadiah dari masyarakat, barang yang dihasilkan dari ekspansi wilayah. Akbar adalah raja yang adil, maka dari itu sultan menghapuskan pajak yang dianggap memberatkan rakyat antara lain pajak jizyah (pajak beribadah) dan pajak petani miskin.

Sehubungan dengan pendapat di atas dapat digambarkan bahwa dalam bidang ekonomi, Sultan Akbar telah membentuk berbagai kebijakan yang sangat memihak kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan dalam bidang ekonomi yang diterapkan antara lain adalah penarikan pajak hasil bumi, pemberian hadiah kepada rakyat, dan menghapus pajak tanah. Sultan Akbar memberikan kebijakan bagi petani untuk tidak memungut pajak atas hasil pertanian rakyat. Justru, Sultan Akbar memberikan hadiah bagi para rakyat yang berjasa untuk kerajaan. Hal ini juga diungkapkan oleh Suhaedi (2013: 182) yang menyatakan bahwa: “Kebijakan Sultan Akbar untuk rakyatnya dalam bidang sosial ekonomi adalah dengan menghapuskan pajak-pajak pertanian terutama bagi petani miskin baik petani muslim maupun non muslim”. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa Sultan Akbar menegaskan kebebasan untuk rakyat untuk tidak memberikan pajak kepada kerajaan. Kebijakan ekonomi dalam hal pajak ini diberlakukan bagi petani baik petani yang menganut agama islam maupun non islam.

5. Kebijakan dalam Perluasan Wilayah Sultan Akbar Tahun 1556-1605

Seperti raja-raja lainnya yang memerintah sebuah kerajaan, dimana mereka akan berusaha memperluas wilayah kekuasaan kerajaannya, sama seperti Sultan Akbar selama ia memerintah di kerajaan Mughal, ia sangat gencar melakukan serangan-serangan ke wilayah-wilayah untuk memperluas daerah kekuasaannya.

Sultan Akbar berkata bahwa “Harus sungguh- sungguh terhadap penaklukan, jika tidak negeri tetangganya akan mengangkat senjata terhadapnya.” Ini melambangkan betapa gigihnya Sultan Akbar terhadap peperangan untuk memperluas wilayah kekuasaannya (Nasution, 2013: 318).

Pada masa awal pemerintahannya, Sultan Akbar tidak langsung menyusun ekspansi perluasan wilayah. Namun ia terlebih dahulu menghadapi pemberontakan yang dilakukan dari keturunan Sher Khan Shah yang masih berkuasa di Punjab. Kemudian pemberontakan yang mengancam kekuasaan Sultan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu, sang penguasa Gwalior dan Agra. Sehingga terjadilah peperangan yang disebut Panipat II pada tahun 1556. Himu dapat dikalahkan. Ia ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh. Peperangan Panipat II ini terjadi pada saat awal pemerintahan Sultan Akbar di kerajaan Mughal. Dalam menghadapi peperangan ini, Sultan Akbar dibimbing langsung oleh Bairam Khan. Ini menjadi bukti betapa kuatnya rasa cinta Bairam Khan terhadap

kerajaan Mughal. Sultan Akbar meraih kemenangan pada peperangan ini. Gwalior dan Agra jatuh kembali ke wilayah kekuasaan kerajaan Mughal.

Setelah persoalan dalam negeri dapat teratasi, maka Sultan Akbar meneruskan program ekspansi perluasan wilayah ke sebelah selatan, utara, barat, dan timur. Di wilayah selatan, Sultan Akbar berhasil menaklukkan beberapa wilayah, diantaranya adalah Malwa pada tahun 1561, Chundar tahun 1561, kerajaan Ghond tahun 1564, Chitor tahun 1568, Ranthabar tahun 1569, Kalinjar tahun 1569, Gujarat tahun 1572, Surat tahun 1573, Bihar tahun 1574, dan Bengal 1576.

Di sebelah utara, Sultan Akbar dapat menguasai Kashmir pada tahun 1586, selanjutnya menaklukkan Shind yang berada di sebelah barat laut Delhi pada tahun 1590, dan Orissa di sebelah timur Sultan Akbar dapat menguasainya pada tahun 1592. Sultan Akbar juga dapat menguasai beberapa wilayah-wilayah lain seperti Kerajaan Deccan pada tahun 1596, Namala pada tahun 1598, Ahmadnagar pada tahun 1600 dan Asitgah pada tahun 1601 (Agustina, 2020)

Dalam keterangan di atas bahwa Sultan Akbar melakukan penyerang-penyerangan ke daerah-daerah yang dimulai pada tahun 1561 dengan penaklukan daerah Malwa sampai pada tahun 1601 yang ditandai dengan dikuasainya daerah Asitgah. Dalam penaklukan Gujarat pada tahun 1572, pasukan kerajaan Mughal dipimpin sendiri oleh Sultan Akbar. Pada tahun 1573 daerah Surat dapat dikuasainya setelah ia mengepung Surat selama satu setengah bulan. Tahun 1574 Sultan Akbar memimpin pasukannya untuk menyerbu Bengala, yang pemimpinnya bernama Daud menentang Sultan Akbar dan mengusir penguasa Bengala dari Patna dan Hajipur. Penguasa Bengala itu melarikan diri ke daerah Orissa pada tahun 1575, kemudian Daud terbunuh dalam pertempuran itu. Namun meski Bengala dapat dicaplok, tapi beberapa kepala sukunya tetap merdeka praktis selama bertahun-tahun.

Prestasi paling gemilang Sultan Akbar adalah penyerbuan serentak benteng Chitor (Mewar) yang dilakukan pada tahun 1567-1568. Dikisahkan bahwa dalam melakukan penyerangan ke benteng Chitor, pasukan Mughal membutuhkan waktu 7 bulan mengempur benteng Chitor di Udaipur. Benteng Chitor ini merupakan benteng yang dikuasai oleh suku Rajput dari Ranthambor dan Kalinjar. Dan pada tahun 1568 benteng Chitor dapat dikuasai oleh Sultan Akbar. Setelah Sultan Akbar dapat menguasai daerah Chitor, maka secara tidak langsung ia telah menundukkan suku yang beragama Hindu yang besar pada

saat itu.

Sistem yang digunakan pada masa pemerintahan Sultan Akbar di kerajaan Mughal adalah sistem pemerintahan militer, yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afghan, Iran, dan Turki, dan muslim asli India. Dengan sistem ini, maka membuat kerajaan Mughal eksis dan mampu memperluas wilayahnya di Hindustan dan Punjab meliputi Gujarat, Rajasthan, Bihar, dan Bengal. Disebelah utara, Sultan Akbar merebut Kabul, Kashmir, Sind dan Baluchistan. Deccan direbut pada tahun 1600, dan meluas sampai ke ujung utara serta beberapa provinsi merdeka di India Selatan. Setelah Sultan Akbar dapat menyelesaikan masalah internal dalam kerajaannya, maka ia mulai menyusun program ekspansi perluasan wilayah. Ia berhasil menguasai Chondar, Ghond, Chitor, Ranthabar, Kalinjar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgarh, Narhala, Ahmadnagar, dan Asirgah (Ahmad, 2020)

Hal itu membuat kerajaan Mughal menjadi sebuah kerajaan besar. Wilayah Kabul dijadikan sebagai gerbang ke arah Turki dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia. Setelah itu untuk menjaga keutuhan dan stabilitas kerajaan Mughal pada saat itu yang memiliki daerah kekuasaan yang luas, maka Sultan Akbar meletakkan sistem administrasi pemerintahan yang rapi dan perlu menjadi pedoman bagi raja-raja Mughal setelahnya. Sultan Akbar membagi imperiumnya ke dalam 15 bagian dengan seorang gubernur di tiap-tiap bagian, sekaligus bertugas sebagai komandan pasukan. Ini diharapkan dapat menjalin hubungan yang erat antara kekuasaan di pusat dengan kekuasaan di daerah. Sistem ini merupakan sistem yang pertama dalam kerajaan Mughal, dimana dalam menjalankan roda pemerintahan kerajaan Mughal sudah dapat dijalankan secara benar dan terarah. Ini semua menandakan betapa hebatnya Sultan Akbar dalam mengatur dan memimpin pemerintahan kerajaan Mughal pada saat itu.

Dalam lingkungan istana sendiri, Sultan Akbar sudah mengatur tentang pembesar-pembesar istana. Hamka (2010) mengatakan bahwa:

Pemerintahan tidak dipegang sendiri, tetapi diadakan menteri-menteri, perdana menteri bergelar wakil, menteri-menteri yang lain bergelar wasir. Di antara para menteri yang banyak itu, yang derajatnya mendekati wakil (perdana menteri) ialah menteri keuangan. Panglima besar perang bergelar "Khan Qanan", Istana mempunyai menteri sendiri yang bergelar *Wasir bilath sultani* (menteri penyelenggaraan istana). Menteri kehakiman bergelar *Ash Sad r*.

Melihat pernyataan di atas, betapa banyaknya wilayah yang telah dikuasai oleh Sultan Akbar yang membuat kerajaan Mughal pada masa pemerintahan Sultan Akbar mencapai puncak kejayaan. Dimana daerah kekuasaan kerajaan Mughal semakin meluas karena kecakapan Sultan Akbar

dalam berperang dan memperluas wilayah kekuasaannya. Kecakapan Sultan Akbar dalam berperang yang berani dalam memimpin pasukan ia warisi dari kakek buyutnya yakni Timurlenk dan juga Jengiz Khan.

C. Segi Pedagogis

Sultan Akbar merupakan salah satu tokoh yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam khususnya di wilayah India. Dalam masa pemerintahannya, Sultan Akbar mendapatkan berbagai rintangan yang dihadapi. Rintangan tersebut ia hadapi dengan gagah berani sehingga dapat mencapai kejayaan selama pemerintahannya.

Nilai karakter yang terkandung dalam bab ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam mempertahankan suatu negara, Sultan Akbar terus melakukan ekspansi untuk memperluas wilayahnya. Berbagai perjuangan dilakukan melalui beberapa aspek seperti politk, agama, perluasan wilayah, dan sebagainya. Hambatan demi hambatan yang datang tidak menyurutkan perjuangan Sultan Akbar dalam mencapai kejayaan. Hal yang patut kita teladani adalah perjuangan dan kerja keras Sultan Akbar dalam memperoleh kesuksesan harus ditanamkan pada generasi bangsa khususnya pelajar. Dalam mencapai prestasi harus diimbangi dengan usaha dan kerja keras dalam belajar.
- b. Sultan Akbar memiliki beberapa kebijakan dalam bidang agama baik untuk agama Islam maupun Agama Hindu yang telah ada di India. Hal yang patut dteladani pada diri Sultan Akbar adalah rasa saling menghargai dan menghormati orang lain dalam beribadah. Saling menghargai dan menghormati adalah akhlak terpuji dan merupakan suatu identitas dari bangsa Indonesia.
- c. Sultan Akbar adalah anak dari Raja Humayun. Sultan Akbar memiliki banyak saudara. Sultan Akbar menjunjung tinggi kekeluargaan dimana ia selalu baik terhadap saudaranya meskipun saudaranya tersebut telah banyak menyulitkan Sultan Akbar. Hal yang patut kita teladani adalah kejahatan tidak harus dibalas dengan kejahatan, namun bersikap lemah lembut dan baik akan dapat menyadarkan orang lain dalam bertindak kejahatan.